



TA. 2026

RANCANGAN AKHIR
RENCANA
KERJA

RANHIR RENJA - DPMPTSP KOTA BITUNG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat- Nya dan karunia-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung Tahun 2026 bertujuan memberikan informasi hasil evaluasi Renja Tahun berjalan (Tahun 2025 Triwulan I); analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah (Tahun 2025 Triwulan I), isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta penelaahan rencana kerja pendanaan Tahun 2026; program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung Tahun 2026 ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan verifikasi penyusunan rancangan akhir RKPD sesuai dengan amanat Inmendagri No.2 Tahun 2025. Laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat positif guna penyempurnaan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan laporan yang representatif.

Bitung, September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG**

Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690108 199603 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2025 S.D TRIWULAN I	6
II.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
II.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	20
II.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026	32
III.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
BAB IV PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja DPMPTSP Triwulan I Tahun 2025	16
Tabel 2.2	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD DPMPTSP Kota Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	18
Tabel 2.3	Jumlah Izin Sektoral yang dikelola Triwulan I Tahun 2025	22
Tabel 2.4	Produk Hukum DPMPTSP Triwulan I Tahun 2025, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bitung	28
Tabel 3	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	36

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Bitung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah, Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, Peraturan Walikota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung menyusun Dokumen Rancangan Akhir Renja 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bitung.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) SKPD, diharapkan sektor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator,

dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Bitung.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bitung yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal sesuai Peraturan Walikota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun

program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1) Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD. 2) Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan. 3) Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan. 4) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, memiliki Landasan Hukum sbb :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.

I.3 Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.1.2. Tujuan

- 1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- 2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan startegis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- 3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- 4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2025 S.D TRIWULAN I
 - II.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - II.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I
 - II.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026
 - III.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2025 S.D TRIWULAN I

II.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 Rencana Kerja yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung meliputi 6 Program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yaitu :

Program :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program pengembangan iklim penanaman modal;
3. Program promosi penanaman modal;
4. Program pelayanan penanaman modal;
5. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
12. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

13. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Fasilitasi Kunjungan Tamu
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
23. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
24. Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
25. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
26. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

- 27. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 28. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 29. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- 30. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
- 31. Pengawasan Penanaman Modal
- 32. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Indikator Kinerja Kegiatan :

- 1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
Masukan : Rp. 565.000,00
Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Hasil : Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja
- 2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
Masukan : Rp. 345.000,00
Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Masukan : Rp. 510.000,00
Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil : Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Masukan : Rp. 6.213.536.392,00

Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Hasil : Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Masukan : Rp. 13.189.000,00

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Hasil : Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Masukan : Rp. 565.000,00

Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Hasil : Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Masukan : Rp. 650.000,00

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Hasil : Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

8. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Masukan : Rp. 740.000,00

Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Hasil : Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Masukan : Rp. 725.000,00

Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Hasil : Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Masukan : Rp. 1.000.000,00

Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Hasil : Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Masukan : Rp. 31.500.000,00

Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Hasil : Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Masukan : Rp. 2.510.000,00

Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Hasil : Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : Rp. 5.000.000,00

Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Hasil : Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Masukan : Rp. 4.750.000,00

Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Hasil : Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

15. Fasilitas Kunjungan Tamu

Masukan : Rp. 4.000.000,00

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Hasil : Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Masukan : Rp. 18.824.000,00

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil : Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Masukan : Rp. 1.866.000,00

Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Hasil : Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Masukan : Rp. 10.000.000,00

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil : Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan : Rp. 136.000.150,00

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Hasil : Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : Rp. 1.220.000,00

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Hasil : Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Masukan : Rp. 25.632.000,00

Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Hasil : Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Masukan : Rp. 72.410.000,00

Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Hasil : Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

23. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Masukan : Rp. 6.268.000,00

Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah

Hasil : Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah

24. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Masukan : Rp. 1.614.000,00

Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang telah disusun

Hasil : Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

25. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Masukan : Rp. 7.610.000,00

Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Hasil : Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

26. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Masukan : Rp. 1.730.000,00

Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota

Hasil : Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota

27. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Masukan : Rp. 8.403.000,00

Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Hasil : Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

28. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Masukan : Rp. 9.723.000,00

Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Hasil : Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

29. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Masukan : Rp. 4.470.000,00

Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Hasil : Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

30. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Masukan : Rp. 3.520.000,00

Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Hasil : Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

31. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

Masukan : Rp. 1.500.000,00

Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha

Hasil : Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Terintegrasi secara Elektronik.

32. Pengawasan Penanaman Modal

- Masukan : Rp. 13.622.600,00
- Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
- Hasil : Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

33. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Masukan : Rp. 1.740.000,00
- Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
- Hasil : Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Dari total keseluruhan Anggaran Belanja DPMPSTSP Tahun 2025 dengan target anggaran sebesar **Rp. 6.606.038.142.00** dan terealisasi Triwulan I sebesar **Rp. 1.782.506.694,-** dengan prosentase penggunaan anggaran keseluruhan sebesar **30%**.

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kalau dilihat capaian Program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD, maka dari 6 Program yang ada, 6 Program yang tertuang dalam Renja dapat di cover dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung Triwulan I Tahun 2025 dengan capaian sebesar **30%**.

Tabel. 2.1

Hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja DPMPTSP Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu	1.900 Izin	401 Izin	21
b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 86	Nilai 94,58	110
Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1.900 Izin	401 Izin	21
Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 45 Proyek PMDN : 455 Proyek	PMA : 27 Proyek PMDN : 227 Proyek	50
b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi	PMA : Rp. 343.931.356. 298 ,- PMDN : Rp. 48.632.866.9	PMA : Rp. 1.007.250.459. 225 ,- PMDN : Rp. 42.607.988.31	267

	81,-	1,-	
c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor	3 Sektor	100
Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi,	3 Event	-	-
b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi	-	-
Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi,	3 Produk	6 Produk	200
b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 25 Perusahaan, PMDN : 150 Perusahaan	PMA : 27 Perusahaan, PMDN : 277 Perusahaan	173

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2026

DPMPTSP KOTA BITUNG

Tabel 2.2

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD DPMPTSP Kota Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2025 (Kondisi akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-1) / Jumlah Realisasi 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (DPA 2025)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran PD yang dievaluasi triwulan I 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD s.d triwulan I Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d triwulan I Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab				
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 12/7x100%		14= 6 + 12			15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
17		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	%	100	%	7,624,862,836	100	%	6,460,118,293	100	%	5,931,955,242	30	1,782,506,694	24	1,447,119,246			54	3,229,625,940	54.44%	54.44%	154	9,689,744,233	154%	127%	DPMPTSP	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Dokumen	933	Dok	6,704,411,605	59	Dok	5,938,981,632	59	Dok	5,901,135,642	15	1,782,506,694	15	1,424,210,246			30	3,206,716,940	51%	54%	89	9,145,698,572	10%	136%	DPMPTSP	
2	18	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	Dok	8,466,975	2	Dok	4,500,000	6	Dok	1,720,000	0	0	3	810,000		3	810,000	50%	47%	5	5,310,000	83%	63%	DPMPTSP	
	2	18	1	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	Dok	2,500,000	1	Dok	565,000	0	0	0	0		0	0	0%	0%	1	2,500,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			1	Lap	2,000,000	1	Lap	345,000	0	0	0	0		0	0	0%	0%	1	2,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP		
	2	18	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					4	Lap	810,000	0	2	810,000		2	810,000	50%	100%	2	810,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	905	Dok	5,628,129,351	28	Dok	5,190,442,193	28	Dok	5,547,683,492	7	1,782,506,694	7	1,354,202,833	14	3,136,709,527	50%	57%	42	8,327,151,720	5%	148%	DPMPTSP
	2	18	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		37	Org	5,158,023,193	38	Org	5,538,463,492	38	1,782,506,694	38	1,347,697,833	39	3,130,204,527	103%	57%	76	8,288,227,720	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		6	Dok	10,491,000	12	Dok	4,550,000	0	0	6	4,550,000	6	4,550,000	50%	100%	12	15,041,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	202	3	Pelaksanaan Penelausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	Dok	4,998,000	12	Dok	565,000	0	0	6	565,000	6	565,000	50%	100%	18	5,563,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	Lap	1,930,000	1	Lap	650,000	0	1	650,000	1	650,000	100%	100%	2	2,580,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP		
	2	18	1	202	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen		1	Dok	5,000,000	1	Dok	740,000	0	1	740,000	1	740,000	100%	100%	2	5,740,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP		
	2	18	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Laporan		4	Lap	5,000,000	4	Lap	725,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	4	5,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	202	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	Dok	5,000,000	1	Dok	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	5,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	3	Dok	170,735,674	3	Dok	79,500,000	2	Dok	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	3	79,500,000	100%	47%	DPMPTSP	
	2	18	1	205	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		1	Unit	1,500,000	1	Unit	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	1	1,500,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP		
	2	18	1	205	11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Orang		2	Paket	78,000,000	0	Paket	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2	78,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			Org		5	Org	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	10	Dok	132,361,053	10	Dok	141,567,172	17	Dok	154,084,000	0	0	0	0	0	0%	0%	10	141,567,172	100%	107%	DPMPTSP	
	2	18	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		1	Paket	6,935,000	1	Paket	2,510,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	6,935,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		1	Paket	15,118,500	1	Paket	128,000,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	15,118,500	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket		1	Paket	5,803,000	1	Paket	750,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	5,803,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket		12	Paket	4,800,000	0	Paket	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12	4,800,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP		
	2	18	1	206	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		12	Lap	8,583,000	12	Lap	4,000,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	12	8,583,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP		
	2	18	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	Lap	100,327,672	12	Lap	18,824,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	12	100,327,672	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	Dok	106,532,143		Dok	0	1	Paket	1,866,000	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	DPMPTSP	
	2	18	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			Unit		1	Paket	1,866,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4	Dok	499,073,345	4	Dok	436,814,196	4	Dok	161,852,150	0	2	53,794,498	2	53,794,498	50%	33%	6	490,608,694	150%	98%	DPMPTSP	
	2	18	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	Lap	11,980,000	12	Lap	10,000,000	0	4	3,500,000	4	3,500,000	33%	35%	16	15,480,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP		
	2	18	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan		12	Lap	139,691,538	12	Lap	116,000,150	0	6	49,074,498	6	49,074,498	50%	42%	18	188,766,036	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP		
	2	18	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan		12	Lap	12,810,000	12	Lap	1,220,000	0	6	1,220,000	6	1,220,000	50%	100%	18	14,030,000	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP		
	2	18	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan		12	Lap	272,332,658	12	Lap	34,632,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	12	272,332,658	#DIV/0!	#DIV/0!	DPMPTSP	
	2	18	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	Dok	159,113,064	2	Dok	86,158,071	2	Dok	33,930,000	0	1	15,402,915	1	15,402,915	50%	45%	3	101,560,986	100%	64%	DPMPTSP	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen																								

2026

Rata-rata Capaian Kinerja (%) ^a		54.44%	54.44%
Predikat Kinerja ^{a*}		Rendah	Rendah
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Tersedianya Anggaran, Sarana & Prasarana, Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat & Bidan-Bidang		

(sesuai Format Tabel T-C.29 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Penjelasan dari Tabel 2.2 adalah sebagai berikut :

- Kolom 3 merupakan kondisi target kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,
- Kolom 6 dan 7 merupakan realisasi dan tingkat capaian realisasi tahun 2024,
- Kolom 8 merupakan perkiraan realisasi dan tingkat capaian kinerja Tahun 2025, Renstra periode 2021-2026.

II.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Kalau di Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, maka boleh dikatakan Berhasil karena capaian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025, prosentase sebesar **30%**, sehingga Program dan Kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang diinginkan.

1. Dari Sasaran Strategis yang pertama yaitu : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan* dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu	1.900 Izin	384 Izin	20

- a. Prosentase Pelayanan yang sesuai SOP dan tepat waktu.
- Penyelesaian berkas pada Triwylan I Tahun 2025 hasil realisasi yang di capai **384 Izin** atau prosentase sebanyak **20%** dari target 1.900 Izin, yang terdiri dari 36 Jenis Izin meliputi :
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Berkas

- Bagian Perekonomian
- Dinas Perhubungan
- Dinas Perdagangan
- Dinas Pariwisata
- Dinas PU dan Kimpraswil
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kesehatan
- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Pendidikan & Kebudayaan

:
:
:
:
:
:
:
:
:

- Berkas
9 Berkas
43 Berkas
- Berkas
- Berkas
- Berkas
332 Berkas
- Berkas
- Berkas

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 86	Nilai 94,58	110

b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Untuk mengetahui sejauh mana Pelayanan atau kinerja layanan yang diselenggarakan DPMPTSP telah memuaskan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kota Bitung, maka dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pengukuran SKM dilakukan melalui pengisian kuesener yang terdiri dari 9 indikator unsur pelayanan. Nilai interval konfersi SKM berdasarkan patokan niai :

- Nilai : 25 – 43,75
Nilai : 43,76 – 62,50
Nilai : 62,51 – 81,25
Nilai : 81,26 – 100

Kinerja Pelayanan : Tidak Baik
Kinerja Pelayanan : Kurang Baik
Kinerja Pelayanan : Baik
Kinerja Pelayanan : Sangat Baik

Telah dilakukan Survei kepada Masyarakat selaku Pemohon Izin melalui DPMPTSP Kota Bitung mendapatkan prosentase sebesar 110 % dari yang ditargetkan. Jumlah responden sebanyak 107 responden diperoleh Nilai rata-rata SKM 94,58 dengan Nilai persepsi “4”, Mutu Pelayanan “A” kategori Sangat Baik, ini merupakan unsur pelayanan tertinggi pada unsur perilaku petugas dalam memberikan pelayanan.

2. Dari Sasaran Strategis yang kedua yaitu : *Meningkatnya kepemilikan izin sesuai standart yang berlaku, dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :*

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kepemilikan Izin sesuai standart yang berlaku			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart	1.900 Izin	384 Izin	20

a. Presentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart

Penyelesaian berkas Tahun 2025 DPMPTSP Kota Bitung mengelola 36 Jenis Izin Sektoral, dengan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 384 Izin dengan presentase yang telah terealisasi sebesar 20% dari yang direncanakan sebanyak 1.900 Izin. Pengurusan izin cenderung kepada Izin Persetujuan bangunan gedung, Tenaga Kesehatan Perawat, Izin Trayek, dan Izin Praktek Dokter Umum.

Tabel 2.3

Jumlah Izin Sektoral yang dikelola s.d Triwulan I Tahun 2025

No	NAMA SKPD		JENIS IZIN	JUMLAH	KET
1	2		3	4	5
1	Dinas Perdagangan	1	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	43	

2	Dinas Perhubungan	2	Izin Trayek	9	
3	Dinas Kesehatan	3	Surat Izin Praktek Dokter Umum (SIP-DU)	30	
		4	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIP-DS)	9	
		5	Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIP-DG)	11	
		6	Surat Izin Praktek Apoteker (SIP-AP)	0	
		7	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D (IORS)	70	
		8	Surat Izin Klinik	11	
		9	Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO)	2	
		10	Surat Izin Refraksionis Opticsien (SIRO)	15	
		11	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)	11	
		12	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	21	
		13	Surat Izin Praktek Perawat (SIP-P)	12	
		14	Surat Izin Tenaga Akupuntur (SITA)	30	
		15	Surat Izin Laboratorium	39	
		16	Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIK-SIPF)	71	

3. Dari Sasaran Strategis yang ketiga yaitu : *Meningkatnya Jumlah Investasi dan Potensi Investasi*, dengan 3 (tiga) Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)	PMA : 45 Proyek PMDN : 455 Proyek	PMA : 27 Proyek PMDN : 227 Proyek	50

a. Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)
Tahun 2025 Triwulan I dengan jumlah penanaman modal untuk Modal Asing (PMA) adalah 27 proyek dan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah 227 proyek sehingga untuk Triwulan I Tahun 2025 mendapat prosentase sebanyak 50%.

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi,	PMA : Rp. 343.931.356.298 ,- PMDN : Rp. 48.632.866.981,-	PMA : Rp. 1.007.250.459.225 ,- PMDN : Rp. 42.607.988.311,-	267

b. Capaian Jumlah Realisasi Investasi
Untuk Perusahaan PMA dari target rencana investasi senilai Rp. 343.931.356.298,- terealisasi sejumlah Rp. 1.007.250.459.225,-. Hal itu dimungkinkan karena ada beberapa perusahaan yang rencana investasinya dari tahun sebelumnya dan baru sebagian atau seluruhnya direalisasikan pada Tahun 2024.

Untuk Perusahaan PMDN dari target rencana investasi senilai Rp. 48.632.866.981,- terealisasi sejumlah Rp. 42.607.988.311,- Jumlah

realisasi penanaman modal dalam negeri di Kota Bitung mengalami peningkatan secara signifikan sebesar **267%**.

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan Jumlah Investasi dan Potensi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah	3 Sektor	3 Sektor	100

c. Jumlah Potensi Unggulan Daerah

Jumlah Potensi Unggulan Daerah yang terealisasi selalu memenuhi harapan target 100% sampai dengan Triiwulan I (30 Maret Tahun 2025) , yang menjadi sasaran strategis dalam Meningkatkan Investasi dan potensi investasi yaitu terdiri dari 3 Sektor ; 1) Sektor Primer, 2) Sektor Sekunder (Industri), 3) Sektor Tersier (jasa).

1. Sektor Primer

Sektor Primer Kota Bitung yaitu Sektor perikanan dengan realisasi investasi PMDN sebesar 17 Proyek tambahan investasi sebesar Rp. 348.700.000,-.

2. Sektor Sekunder (Industri)

Sektor Sekunder (Industri) dengan realisasi investasi PMA yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar 18 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 15.007.490.895,45., 2) Sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan dengan realisasi investasi sebesar 1 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 133.499.919,-

Sektor Sekunder (Industri) dengan realisasi investasi PMDN yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar 70 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 20.564.900,-, 2) Sektor Industri Lainnya dengan realisasi investasi sebesar 3 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 2.500.000,-.

3. Sektor Tersier (Jasa)

Sektor Tersier (Jasa) dengan realisasi investasi PMA yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Jasa Lainnya dengan realisasi investasi sebesar 1 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 2.500.498.483,03., 2) Sektor Transportasi gudang dan Telekomunikasi dengan realisasi investasi sebesar 6 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 2.144.998.698,70.

Sektor Tersier (Jasa) dengan realisasi investasi PMDN yang diunggulkan pada Kota Bitung yaitu; 1) Sektor Perdagangan dan reparasi dengan realisasi investasi sebesar 105 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 8.014.000.000,- 2) Sektor Transportasi gudang dan Telekomunikasi dengan realisasi investasi sebesar 6 Proyek, tambahan investasi sebesar Rp. 2.144.998.698,70.

4. Dari Sasaran Strategis yang keempat yaitu : *Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :*

Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi,	2 Event	-	-

a.Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi

Tidak ada Event yang diikuti sebagai realisasi 0% dari Jumlah Keikutsertaan dalam Event Promosi Investasi. Kegiatan Promosi selama Tahun 2024 tidak ada yang diikuti karena anggaran yang terbatas atau kurang yang disebabkan karena reconfusing anggaran.

Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik	4 Bahan Promosi	-	-

b. Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik

Jumlah Media Promosi dan informasi Cetak & Elektronik yang ditargetkan 4 Bahan Promosi, realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebanyak 2 Bahan Promosi yaitu Bahan Promosi Video Visualisasi dan Bahan Promosi Media Elektronik seperti Fun Page FB DPMPTSP, sehingga mencapai **50%** dari yang ditargetkan karena kebutuhan akan Media promosi. Media Promosi dan Informasi Elektronik terdiri dari;

1. Bahan Promosi Video Visualisasi.
2. Bahan Promosi Media Elektronik seperti Fun Page FB DPMPTSP.
- Semua Jenis Media Promosi dan informasi Cetak & Elektronik dibuat dalam rangka mendukung kegiatan peningkatkan Kualitas Sistem Informasi dan Promosi Investasi yang ada di Kota Bitung.

3. Dari Sasaran Strategis yang kelima yaitu : *Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dengan 2 (dua) Indikator dengan rincian sebagai berikut :*

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi,	3 Produk	6 Produk	200

a. Produk-produk Hukum Kemudahan Berinvestasi

Produk Hukum baru maupun perubahan dibuat dalam rangka menyesuaikan dengan adanya;

1. Peraturan-peraturan yang lebih tinggi dalam mengatur kegiatan penanaman modal,
2. Dampak perubahan aturan-aturan serta perkembangan ekonomi yang mempengaruhi kemudahan berinvestasi,
3. Dampak dari perubahan Era Digital sehingga aktivitas-aktivitas pembuatan izin dalam penanaman modal beralih dari manual ke Online System, maka harus menyesuaikan dengan produk-produk hukum yang dibuat.

Produk-produk Hukum kemudahan berinvestasi yang direalisasikan selama Tahun 2025 yaitu;

Tabel 2.4

Produk Hukum DPMPTSP Triwulan I Tahun 2025, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bitung

1	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/11/I/2025	SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bitung.
2	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/12/I/2025	SK Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan pada DPMPTSP Kota Bitung.
3	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/13/I/2025	SK Kepala Dinas tentang Penetapan Index Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bitung.
4	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/14/I/2025	SK Kepala Dinas tentang Penetapan Petugas Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bitung.
5	Nomor : 570/SK-	SK Kepala Dinas tentang

	DPMPTSP/15/I/2025	Penetapan Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Bitung.
6	Nomor : 570/SK-DPMPTSP/15/I/2025	SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani

Untuk capaian realisasi Produk Hukum baru maupun perubahan yang dihasilkan sampai Triwulan Tahun 2025 yaitu 6 Produk Hukum dari target 3 Produk Hukum, dengan capaian sebesar 200%.

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal	PMA : 21 Perusahaan, PMDN : 125 Perusahaan	PMA : 19 Perusahaan, PMDN : 107 Perusahaan	86

- b. Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanaman modal.
- Jumlah capaian pada Triwulan I Tahun 2025, peningkatan peran serta dan partisipasi penanam modal yang ditargetkan yaitu untuk PMA : 19 Perusahaan dari target 21 Perusahaan dan PMDN : 107 Perusahaan dari target 125 Perusahaan, maka didapatkan Prosentase sebesar 86%. Hasil prosentase capaian pada Tahun 2025 meningkat disebabkan karena;
- 1) Kesadaran para penanam modal atau investor untuk menginformasikan hasil kegiatan perusahaan mereka ke DPMPTSP,

- 2) Tindaklanjut dari Pelaku Usaha dalam membuat pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan pembangunan daerah tahun sebelumnya. Program prioritas pembangunan daerah memuat program – program yang berorientasi pada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

II.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Ada beberapa Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Belum maksimalnya pelayanan penanaman modal untuk perbaikan iklim investasi karena belum adanya Rancangan Umum Penanamam Modal (RUPM) Kota Bitung.
2. Pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, tetapi belum berjalan maksimal karena masih terkendala dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan (masih ada izin yang masih diterbitkan oleh instansi teknis terkait).
3. Belum maksimalnya Layanan Sistem Satu Pintu
Akan dilakukan koordinasi dengan instansi teknis terhadap tim teknis layanan perizinan, untuk menempatkan tim teknis layanan perizinan di DPMPTSP sehingga sistem pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah teknis menjadi efektif dan efisien.

Penjabaran kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, guna mencapai tujuan dan sasaran. Setiap tahunnya tidak semua program dan kegiatan dapat diakomodir, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Pada tahun 2025 program yang dijalankan sebanyak 6 program, dan kegiatan yang dijalankan sebanyak 12 kegiatan.

Kalau ditelaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2025 maka ada beberapa Program yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat yang masuk dalam usulan yang ditetapkan yaitu :

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Dengan dimasukkannya LKPM oleh pelaku usaha maka peran serta masyarakat selaku pelaku usaha akan menunjang penyampaian data investasi yang ada. Dalam menilai kinerja Aparatur, masyarakat diberikan kesempatan lewat pengisian Survey Kepuasan Masyarakat dalam penilaian pelayanan publik yang dilakukan.
- Program Pelayanan Penanaman Modal.
Memberikan pelayanan kepada pelaku usaha atau masyarakat untuk mengurus izin dengan sistem terbuka dan transparan, juga melakukan sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026

III.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan DPMPTSP tahun 2026 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD,
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realiasi Anggaran

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai,
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya,
- Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
Sub Kegiatan :
- Pengadaan Mebel,
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota,
Sub Kegiatan :
- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- b) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Kabupaten/ Kota

- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota,

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/ Kota,
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota,

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif,
- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik,
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota,

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,

Sub Kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2026

DPMPTSP KOTA BITUNG

Tabel 3

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2025	Perkiraan Maju Tahun 2026	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
					Indikator	Target	Output	Target	Outcome	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										7.165.452.123	7.763.197.335			
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										7.165.452.123	7.763.197.335		DPMPTSP	DAU
18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kota Bitung	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	7.079.723.523	7.668.895.875		DPMPTSP	DAU
18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bitung	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	1.720.000	1.892.000		DPMPTSP	DAU
18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	565.000	621.500		DPMPTSP	DAU
18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	345.000	379.500		DPMPTSP	DAU
18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bitung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	810.000	891.000		DPMPTSP	DAU
18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kota Bitung	Prosentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	90%	Prosentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	90%	Prosentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	90%	6.383.260.523	7.021.586.575		DPMPTSP	DAU
18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Bitung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	6.375.030.523	7.012.533.575		DPMPTSP	DAU
18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.550.000	5.005.000		DPMPTSP	DAU
18 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	565.000	621.500		DPMPTSP	DAU
18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	650.000	715.000		DPMPTSP	DAU
18 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	740.000	814.000		DPMPTSP	DAU
18 01 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	725.000	797.500		DPMPTSP	DAU
18 01 2.01 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000	1.100.000		DPMPTSP	DAU

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2026

DPMPTSP KOTA BITUNG

KODE	1	2	3	4	5	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2025	Perkiraan Meju Tahun 2026	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Indikator	Target	Ouput	Target	Outcome	Target					
18	01	2.05			Kota Bitung	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	108.000.000	118.800.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.05	02		Kota Bitung	Jumlah Paket Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Tersedianya Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Tersedianya Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	108.000.000	118.800.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.06			Kota Bitung	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	252.980.000	278.278.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.06	01		Kota Bitung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.510.000	2.761.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.06	02		Kota Bitung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	188.500.000	207.350.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.06	05		Kota Bitung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	6.250.000	6.875.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.06	08		Kota Bitung	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.800.000	14.080.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.06	09		Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.920.000	47.212.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.07			Kota Bitung	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	1 Paket	Tersedianya Mebel dan Mesin Lainnya	1 Paket	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	1 Paket	56.356.000	61.991.600		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.07	06		Kota Bitung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	56.356.000	61.991.600		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.08			Kota Bitung	Jasa Penunjang Urusan Kantor	4 Paket	Jasa Penunjang Urusan Kantor	4 Paket	Jasa Penunjang Urusan Kantor	4 Paket	192.867.000	212.153.700		DPMPPTSP	DAU
18	1	2.08	01		Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	11.000.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.08	02		Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	160.800.000	176.880.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.08	03		Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	1.220.000	1.342.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.08	04		Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	20.847.000	22.931.700		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.09			Kota Bitung	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket	Tersedianya Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket	84.540.000	92.994.000		DPMPPTSP	DAU
18	01	2.09	01		Kota Bitung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	84.540.000	92.994.000		DPMPPTSP	DAU

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2026

DPMPTSP KOTA BITUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2025	Perkiraan Maju Tahun 2026	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
						Indikator	Target	Output	Target	Outcome	Target					
1	2				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Kota Bitung	Persentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota	4,98	Persentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota	4,98	Persentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota	4,98	19.275.000	21.202.500		DPMPTSP	DAU
18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Kota Bitung	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM	1 Paket	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM	1 Paket	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM	1 Paket	1.125.000	1.237.500		DPMPTSP	DAU
18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1.125.000	1.237.500		DPMPTSP	DAU
18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				Kota Bitung	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi	1 Paket	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi	1 Paket	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi	1 Paket	18.150.000	19.965.000		DPMPTSP	DAU
18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.227.000	7.949.700		DPMPTSP	DAU
18 02 2.02 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota				Kota Bitung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.923.000	12.015.300		DPMPTSP	DAU
18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Kota Bitung	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi	80%	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi	80%	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi	80%	9.223.000	10.145.300		DPMPTSP	DAU
18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Kota Bitung	Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan	1 paket	Tersedianya Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan	1 paket	Tersedianya Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan	1 paket	9.223.000	10.145.300		DPMPTSP	DAU
18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				Kota Bitung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.343.000	8.077.300		DPMPTSP	DAU
18 3 2.01 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.680.000	2.068.000		DPMPTSP	DAU
18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Kota Bitung	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP	90%	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP	90%	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP	90%	40.197.000	44.216.700		DPMPTSP	DAU
18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				Kota Bitung	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Paket	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Paket	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Paket	40.197.000	44.216.700		DPMPTSP	DAU
18 04 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				Kota Bitung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	25.144.000	27.658.400		DPMPTSP	DAU
18 04 2.01 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				Kota Bitung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	14 Pelaku Usaha	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	14 Pelaku Usaha	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	14 Pelaku Usaha	4.470.000	4.917.000		DPMPTSP	DAU

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2026

DPMPTSP KOTA BITUNG

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2025	Perkiraan Maju Tahun 2026	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
								Indikator	Target	Ouput	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	04	2.01	07	Penyediaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko			Kota Bitung	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	120 Orang	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	120 Orang	3.520.000	3.872.000		DPMPTSP	DAU
18	04	2.01	08	Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			Kota Bitung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	7.063.000	7.769.300		DPMPTSP	DAU
18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Kota Bitung	Persentase pelaku penanaman modal dengan modal diatas 500 juta yang memiliki Laporan Kerja	80%	Persentase pelaku penanaman modal dengan modal diatas 500 juta yang memiliki Laporan Kerja	80%	15.293.600	16.822.960		DPMPTSP	DAU
18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bitung	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	4 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	4 Dokumen	15.293.600	16.822.960		DPMPTSP	DAU
18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal			Kota Bitung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	15.293.600	16.822.960		DPMPTSP	DAU/DAK
18	06			PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Kota Bitung	Prosentase Jumlah Pemohon Izin yang memanfaatkan Sistem Informasi Penanaman Modal	85%	Prosentase Jumlah Pemohon Izin yang memanfaatkan Sistem Informasi Penanaman Modal	85%	1.740.000	1.914.000		DPMPTSP	DAU
18	06	2.01		Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Kota Bitung	Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Paket	Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Paket	1.740.000	1.914.000		DPMPTSP	DAU
18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan & Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kota Bitung	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1.740.000	1.914.000		DPMPTSP	DAU
TOTAL													7.165.452.123	7.763.197.335		

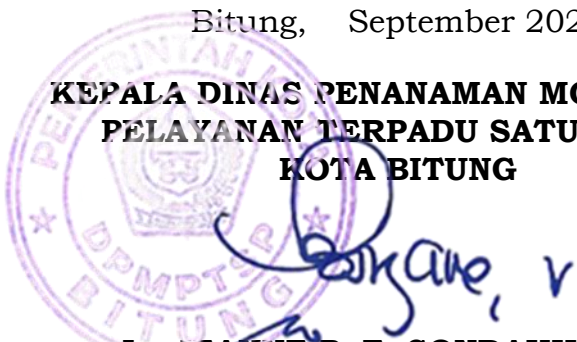
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung yang berisikan program dan kegiatan disusun sebagai pedoman rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung untuk tahun 2026. Renja merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung yang akan dilaksanakan untuk tahun 2026. Untuk keberhasilan Rencana Kerja (Renja) tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang memadai, sehingga dapat diwujudkan pelayanan perizinan yang optimal secara terpadu, cepat, tepat, dan akurat.

Bitung, September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG



Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19690108 199603 2 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

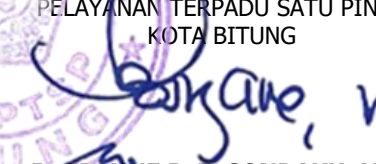
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2025	Perkiraan Maju Tahun 2026	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
									Indikator	Target	Opout	Target	Outcome	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										7.165.452.123	7.763.197.335			
18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										7.165.452.123	7.763.197.335		DPMPTSP	DAU
18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kota Bitung	Indeks Reformasi Birokasi	BB	Indeks Reformasi Birokasi	BB	Indeks Reformasi Birokasi	BB	7.079.723.523	7.668.895.875		DPMPTSP	DAU
18	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bitung	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	1.720.000	1.892.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	565.000	621.500		DPMPTSP	DAU
18	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	345.000	379.500		DPMPTSP	DAU
18	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bitung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	810.000	891.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kota Bitung	Prosentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	90%	Prosentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	90%	Prosentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	90%	6.383.260.523	7.021.586.575		DPMPTSP	DAU
18	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Bitung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	6.375.030.523	7.012.533.575		DPMPTSP	DAU
18	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.550.000	5.005.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	565.000	621.500		DPMPTSP	DAU
18	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	650.000	715.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	740.000	814.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	725.000	797.500		DPMPTSP	DAU
18	01	2.01	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000	1.100.000		DPMPTSP	DAU

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2025	Perkiraan Maju Tahun 2026	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
								Indikator	Target	Ouput	Target	Outcome	Target					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kota Bitung	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90%	108.000.000	118.800.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Kota Bitung	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	108.000.000	118.800.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kota Bitung	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	90%	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	90%	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	90%	252.980.000	278.278.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Bitung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	2.510.000	2.761.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Bitung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	188.500.000	207.350.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan			Kota Bitung	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan	1 Paket	Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan	1 Paket	6.250.000	6.875.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Bitung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.800.000	14.080.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.920.000	47.212.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kota Bitung	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	1 Paket	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	1 Paket	Peralatan Mebel dan Mesin Lainnya	1 Paket	56.356.000	61.991.600		DPMPTSP	DAU
18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Bitung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	56.356.000	61.991.600		DPMPTSP	DAU
18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Bitung	Jasa Penunjang Urusan Kantor	4 Paket	Jasa Penunjang Urusan Kantor	4 Paket	Jasa Penunjang Urusan Kantor	4 Paket	192.867.000	212.153.700		DPMPTSP	DAU
18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	11.000.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	160.800.000	176.880.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	1.220.000	1.342.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Bitung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	20.847.000	22.931.700		DPMPTSP	DAU
18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Bitung	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket	Tersedianya Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	7 Paket	84.540.000	92.994.000		DPMPTSP	DAU
18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Bitung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	84.540.000	92.994.000		DPMPTSP	DAU

KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2025	Perkiraan Maju Tahun 2026	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana				
							Indikator		Target	Ouput							Target	Outcome		Target
1		2		3	4	5	6		7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
18	02					Kota Bitung	Presentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota		4,98	Presentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota		4,98	Presentase Peningkatan Investasi di Kab/Kota		4,98	19.275.000	21.202.500		DPMPTSP	DAU
18	02	2.01				Kota Bitung	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM		1 Paket	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM		1 Paket	Jumlah Produk Hukum dan Klinik LKPM		1 Paket	1.125.000	1.237.500		DPMPTSP	DAU
18	02	2.01	01			Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	1.125.000	1.237.500		DPMPTSP	DAU
18	02	2.02				Kota Bitung	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi		1 Paket	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi		1 Paket	Jumlah Dokumen RUPM, Buku Potensi & Peluang Investasi		1 Paket	18.150.000	19.965.000		DPMPTSP	DAU
18	02	2.02	01			Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	7.227.000	7.949.700		DPMPTSP	DAU
18	02	2.02	04			Kota Bitung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota		2 Dokumen	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		2 Dokumen	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		2 Dokumen	10.923.000	12.015.300		DPMPTSP	DAU
18	3					Kota Bitung	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi		80%	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi		80%	Persentase Peserta Pelaku usaha yang ikut serta dalam promosi		80%	9.223.000	10.145.300		DPMPTSP	DAU
18	03	2.01				Kota Bitung	Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan		1 paket	Tersedianya Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan		1 paket	Terealisasinya Bahan Promosi dan Event yang dilaksanakan		1 paket	9.223.000	10.145.300		DPMPTSP	DAU
18	03	2.01	02			Kota Bitung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		2 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		2 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		2 Dokumen	7.343.000	8.077.300		DPMPTSP	DAU
18	3	2.01	03			Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1.880.000	2.068.000		DPMPTSP	DAU
18	4					Kota Bitung	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP		90%	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP		90%	Persentase pemohon izin yang dilayani sesuai SOP		90%	40.197.000	44.216.700		DPMPTSP	DAU
18	04	2.01				Kota Bitung	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		1 Paket	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		1 Paket	Pemenuhan Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		1 Paket	40.197.000	44.216.700		DPMPTSP	DAU
18	04	2.01	05			Kota Bitung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		14 Kegiatan Usaha	25.144.000	27.658.400		DPMPTSP	DAU
18	04	2.01	06			Kota Bitung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		14 Pelaku Usaha	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha		14 Pelaku Usaha	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha		14 Pelaku Usaha	4.470.000	4.917.000		DPMPTSP	DAU

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp) Tahun 2025	Perkiraan Maju Tahun 2026	Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab	Sumber Dana
								Indikator	Target	Ouput	Target	Outcome	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
18	04	2.01	07	Penyediaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko			Kota Bitung	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	120 Orang	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	120 Orang	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	120 Orang	3.520.000	3.872.000		DPMPTSP	DAU
18	04	2.01	08	Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			Kota Bitung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	7.063.000	7.769.300		DPMPTSP	DAU
18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Kota Bitung	Persentase pelaku penanaman modal dengan modal diatas 500 juta yang memiliki Laporan Kerja	80%	Persentase pelaku penanaman modal dengan modal diatas 500 juta yang memiliki Laporan Kerja	80%	Persentase pelaku penanaman modal dengan modal diatas 500 juta yang memiliki Laporan Kerja	80%	15.293.600	16.822.960		DPMPTSP	DAU
18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bitung	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	4 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	4 Dokumen	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	4 Dokumen	15.293.600	16.822.960		DPMPTSP	DAU
18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal			Kota Bitung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	14 Kegiatan Usaha	15.293.600	16.822.960		DPMPTSP	DAU/DAK
18	06			PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Kota Bitung	Prosentase Jumlah Pemohon Izin yang memanfaatkan Sistem Informasi Penanaman Modal	85%	Prosentase Jumlah Pemohon Izin yang memanfaatkan Sistem Informasi Penanaman Modal	85%	Prosentase Jumlah Pemohon Izin yang memanfaatkan Sistem Informasi Penanaman Modal	85%	1.740.000	1.914.000		DPMPTSP	DAU
18	06	2.01		Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Kota Bitung	Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Paket	Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Paket	Pemenuhan Fasilitas Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Paket	1.740.000	1.914.000		DPMPTSP	DAU
18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan & Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kota Bitung	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1.740.000	1.914.000		DPMPTSP	DAU
TOTAL														7.165.452.123	7.763.197.335			

Bitung, September 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG

Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc
NIP. 19690108 199603 2 001